

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, selain itu negara ini juga memiliki kekayaan suku, budaya yang diakui oleh dunia internasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir dari pengorbanan jutaan jiwa raga pejuang bangsa yang bertekad mempertahankan dan memperjuangkan kedaulatan atas bernegara. Indonesia dengan semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” mengartikan bahwa negara ini berdiri atas ragam budaya, etnis dan Bahasa sehingga negara ini sangat menjunjung kebersamaan dalam menggapai cita-cita bangsa Indonesia. Namun, pada kehidupan nyata bangsa Indonesia sangat jauh dari kata sempurna, karena realitas politik dan kehidupan berdemokrasi belum menunjukkan arah yang sesuai, demokrasi selalu dipersoalkan sehingga menjadi paradoks di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan di setiap pulau, atau daerah menyebabkan banyaknya keinginan dan egoism kedaerahan yang terjadi dan tidak sejalan dengan keinginan masyarakat Indonesia di daerah lainnya.

Demokrasi selalu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat sipil, mulai dari masyarakat yang sedang berkumpul di warung sampai masyarakat elit dan juga kalangan politisi yang memperbincangkan mengenai konsepsi demokrasi. Demokrasi seakan-akan tidak lagi menjadi hal yang ambigu dan patut untuk diteliti terutama pasca reformasi 1998, membuat masyarakat mengikutsertakan dirinya dalam dinamika politik di Indonesia (Ridlwani, 2015: 307).

Pasca terjadinya reformasi 1998 memicu adanya keinginan untuk memperbaiki ketidakseimbangan antara kekuasaan yang memicu keikutsertaan rakyat sebagai pengendali utama dalam demokrasi untuk menyeimbangkan, menyesuaikan antar kekuasaan dalam konsep negara. Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator yang penting dalam keberhasilan demokrasi. Bentuk partisipasi masyarakat sangatlah beragam, salah satunya adalah keikutsertaan diri dalam demonstrasi. demonstrasi kerap

berkonotasi negatif karena identik dengan kekerasan namun sejatinya demonstrasi merupakan alat untuk menjaga stabilitas politik dalam konteks demokrasi.

Demonstrasi terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan sehingga masyarakat menuntut adanya keseimbangan kebijakan dan pelaksanaan yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Salah satu contoh demonstrasi terjadi pada 24 September 2019, yang diikuti oleh para pelajar, mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut penundaan disahkannya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Agraria, dan undang-undang yang tidak sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Gerakan yang semula dilakukan di media sosial akhirnya menjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia, akar utama dari demonstrasi tersebut karena ketidaksepakatan atas kebijakan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR dianggap memanfaatkan keadaan ditengah tertutupnya saluran komunikasi kelembagaan negara dengan masyarakat sehingga demonstrasi 24 September 2019 menjadi salah satu puncak keikutsertaan masyarakat dalam memperhatikan kebijakan pemerintah dan DPR.

Hal ini terjadi akibat dari adanya pasal-pasal kontroversial yang membuat keresahan di dalam masyarakat, karena negara dianggap ikut campur kedalam ranah privasi masyarakat seperti pada masa orde baru. Salah satu dari pasal-pasal kontroversial yang terdapat pada pasal 470 dan pasal 471 RKUHP tentang perempuan yang melakukan aborsi akan diberikan sanksi pidana dengan paling lama akan dipenjara selama empat tahun. Hal tersebut memicu tuntutan kepada pemerintah untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tentang penghapusan kekerasan seksual demi keselamatan dan keamanan perempuan, kecemasan perempuan dalam perlakuan yang mereka dapatkan di kehidupan sosial secara nyata dan negara belum dapat menindak tegas terhadap pelaku pelecehan dan kekerasan seksual yang diterima oleh para kaum perempuan.

Masyarakat merangkum 7 (tujuh) tuntutan utama yang akan diberikan kepada DPR RI, tuntutan tersebut adalah penundaan pengesahan RKUHP, merevisi UU KPK, revisi UU Ketenagakerjaan, revisi RUU Agraria, menuntut

pengesahan RUU PKS, menghentikan penangkapan aktivis Indonesia (Kompas, 2019). Gerakan sosial tersebut dilakukan pertama kali melalui *platform* sosial media twitter dan berhasil menarik perhatian masyarakat terutama para pelajar. Aksi yang dilakukan di sosial media tersebut tidak hanya mencuri perhatian kalangan mahasiswa saja melainkan perhatian pelajar yang masih duduk di bangku SMA sederajat sehingga gerakan sosial yang dilakukan secara digital ini berlangsung secara masif dengan menggunakan *hashtag* atau tagar #MosiTidakPercaya yang ditujukan kepada pemerintah terutama kepada lembaga legislatif yaitu DPR RI. Demonstrasi yang dilakukan pada 24 September 2019 pun diberi nama gerakan reformasi dikorupsi, dimana pengikut gerakan tersebut yang berasal dari pelajar merupakan generasi pengguna sosial media.

Gambar 1. Aksi Digital Reformasi Dikorupsi di Twitter



Sumber: Twitter

Media sosial terutama twitter telah menjadi *platform* yang setiap hari digunakan, bahkan twitter dikatakan sebagai media sosial dengan tingkat intelektual penggunaannya yang melebihi sosial media lainnya. Penyebaran informasi sudah banyak diambil alih oleh media sosial terutama twitter, saat gerakan reformasi dikorupsi pun banyak sekali yang membuat opini-opini serta kajian masyarakat terhadap isu nasional menggunakan *platform* twitter sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi.

Gambar 2. Aksi Digital Reformasi Dikorupsi di Twitter



Sumber: Twitter

Gerakan reformasi dikorupsi memicu kembali keaktifan pemuda dan pemudi di Indonesia terhadap dinamika politik nasional, gerakan tersebut memberikan setitik harapan terhadap pemuda-pemudi dalam dunia politik, selain itu gerakan reformasi dikorupsi merupakan salah satu gerakan besar yang dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat. Kemajuan j zaman yang sangat pesat membuat komposisi penduduk tiap generasi menjadi berubah hal tersebut membuat karakteristik yang berbeda-beda. Reformasi dikorupsi merupakan gerakan yang tidak dapat diremehkan, dampak dari gerakan tersebut juga banyak dirasakan.

Partisipasi tradisional yang dahulu sering dilakukan seperti berbicara tatap muka dengan kerabat mengenai isu politik, demo, kampanye dan sebagainya, kemudian bertransformasi menjadi partisipasi online yaitu saling beradu argument atau pendapat di kolom komentar sosial media, mengkampanyekan pemimpin pilihannya melalui unggahan kontennya di media sosial, hingga yang bersifat non konvensional seperti membuat “meme” untuk menjatuhkan kandidat lainnya. a Terlihat jelas bahwa secara disengaja atau tidak, dengan ikut sertanya warga dunia maya terlibat aktivitas politik di media sosial, mereka sudah melakukan partisipasi politik daring. (Halim, 2020: 31).

Manusia merupakan makhluk dinamis, sehingga banyak perubahan di dunia sosial. Kecanggihan teknologi sangat membantu di dalam dunia sosial dan

politik, salah satunya adalah dalam hal partisipasi. Saat ini partisipasi politik telah melangkah menuju dunia digital sehingga partisipasi politik ini tidak selalu bersifat konvensional seperti pertemuan tatap muka. Banyak sekali agenda-agenda politik yang telah dialihkan ke dalam dunia digital, salah satunya adalah gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan salah satu kegiatan politik yang pasti akan dilakukan oleh masyarakat terutama di negara demokrasi. Saat ini gerakan sosial ~~pun~~ sudah bersifat modern sehingga terjadi gerakan sosial digital dimana gerakan sosial tidak lagi dilakukan secara fisik melainkan menggunakan platform sosial media karena dianggap lebih efisien secara waktu, tenaga, biaya dan keamanan. Semua elemen masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi dalam gerakan tersebut.

Gen Zenial (Gen Z) merupakan generasi teknologi, generasi Z membesar di dalam dunia yang semuanya terhubung dengan teknologi sejak dari awal lahir (Mahani, dkk, 2010: 2). Hellen Chou menjelaskan bahwa generasi (Z) atau digital merupakan generasi muda yang tumbuh dan berkembang dengan sebuah ketergantungan yang besar pada teknologi digital. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Hellen Chou P maka tidak mengherankan apabila pada usia muda, orang-orang yang masih berstatus sebagai peserta didik telah terampil dalam penguasaan media sosial (Hellen Chou P, 2012: 35). *Forbes Magazine* membuat survei tentang generasi z di Amerika Utara dan Selatan, di Afrika, di Eropa, di Asia dan di Timur Tengah dengan 49 ribu anak-anak ditanya (Dill, 2020: 20).

Semua kalangan tanpa terkecuali memiliki porsi yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam hal isu politik. Apalagi ditambah dengan kecanggihan era digital memudahkan setiap orang untuk berekspresi, terutama generasi z yang sudah memiliki hak pilih dan tidak dapat dipisahkan dari r kecanggihan internet sejak kecil akan lebih mudah untuk berpartisipasi politik. Kemajuan j zaman yang sangat pesat membuat komposisi penduduk tiap generasi menjadi berubah hal tersebut membuat karakteristik yang berbeda-beda. Generasi z dianggap jauh lebih paham dan lebih berani terhadap politik di usianya yang masih tergolong muda, dengan adanya bantuan dari media sosial yang menyebarkan informasi secara cepat membuat ~~para~~ gen z secara sengaja atau pun tidak sengaja membaca

informasi mengenai politik tersebut, bahkan ikut serta dalam membahas kondisi negara, banyak generasi z yang telah berani membahas masalah politik dan diangkat ke sosial media masing-masing.

Penelitian tentang generasi muda dan partisipasi politik sudah pernah dilakukan dengan judul “Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial Generasi Muda Pengguna Media Sosial”. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 73,2% responden memberikan suara pada pemilu legislatif 2014 dan sebagian besar (80%) menunjukkan keinginan besar untuk memberikan suara pada pemilu Presiden 2014. Reformasi dikorupsi juga merupakan gerakan pertama yang berhasil dilakukan secara online melalui media sosial dan gerakan tersebut terjadi secara masif terutama melalui media sosial twitter. Gerakan aksi reformasi dikorupsi banyak media massa yang tidak menyiarkan berita mengenai aksi mahasiswa besar-besaran tersebut, hampir semua informasi yang diterima oleh masyarakat berasal dari media sosial terutama twitter (Christiany Juditha, 2018: 96).

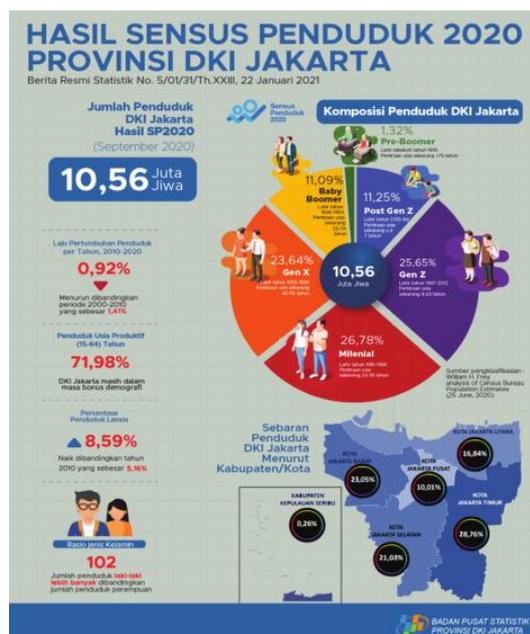
Generasi z yang saat ini sangat bersahabat dengan sosial media bisa lebih mudah memahami dinamika politik saat ini hal tersebut karena sosialisasi politik dapat terjadi secara tidak langsung, yang kemudian sosialisasi politik tersebut dapat diterima oleh para pengguna sosial media baik secara sadar ataupun tidak sadar. sosialisasi politik menimbulkan rasa penasaran dan keingin tauan pembaca dalam isu-isu politik yang sedang terjadi. Sosialisasi politik saat ini mengalir bersama generasi z melalui sosial media, sehingga sosialisasi politik menimbulkan suatu pemahaman politik. Saat ini pemahaman politik sudah tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional seperti sekolah politik melainkan bisa disederhanakan dengan adanya aksi-aksi digital, pembahasan isu-isu seputar politik, berita-berita politik, “meme” tentang politik serta akun-akun politik di sosial media yang membuat mereka tertarik untuk memahami dan berpartisipasi dalam perkembangan politik di Indonesia.

Dengan diberlakukannya sosialisasi politik dan massifikasi dari *platform* media digital dapat memudahkan terjadinya peningkatan budaya politik di Indonesia. Budaya politik sebagai salah satu bagian kebudayaan merupakan satu, di antara sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekan sistem politik (Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Suatu Model

Pengantar, 1988: 8). Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem pemerintahan dalam suatu negara, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan, dan sebagainya. Menurut Samuel H. Beer, Adam B. Ulam, Gilbert Abcarian dan George S. Masannat, umumnya dianggap dalam sistem politik terdapat empat variabel, yaitu : (1) **kekuasaan**, sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok dalam masyarakat; (2) **kepentingan**, tujuan-tujuan yang dikejar oleh para pelaku atau kelompok politik; (3) **kebijakan**, hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan; dan (4) **budaya politik**, orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik (Miriam Budiardjo, 1981: 9).

Peneliti memilih tempat penelitian di daerah Jakarta Timur, dikarenakan menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada tahun 2020 sensus penduduk DKI Jakarta mencatat bahwasanya jumlah Gen Z di Jakarta Timur lebih banyak dari wilayah Jakarta Lainnya. Hal tersebut tercatat di dalam diagram resmi BPS DKI Jakarta.

Gambar 3.
Infografis Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Penelitian ini akan berfokus pada pengaruh aksi digital terhadap budaya politik Gen Z di Jakarta Timur. Hal ini diakibatkan pesatnya media yang mempengaruhi masyarakat untuk bermedia sosial sehingga masyarakat akan lebih mudah mengetahui informasi mengenai topik yang akan dicari oleh masyarakat di media sosial. Fokus penelitian ini tentang pengaruh dari adanya aksi digital terhadap pemahaman politik gen Z di wilayah Jakarta Timur.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Gerakan Sosial Digital “Reformasi Dikorupsi” di Twitter Terhadap Pemahaman Politik Gen Z di Jakarta Timur” memerlukan beberapa peninjauan dari penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa referensi yang dijadikan tinjauan pustaka oleh peneliti, guna mencari persamaan dan perbedaan dari topik penelitian sebelumnya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Herian Zulriski	Analisis Budaya Politik lokal pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kauntan singing tahun 2015.	Kuantitatif	2015	Penelitian ini membahas tentang budaya politik dengan menggunakan teori yang sama dan metode yang sama.	Penelitian ini berfokus kepada budaya politik dalam sisi pemilihan kepala daerah dan locus penelitian pun berbeda.
2.	Lukman Budiyanto	Demonstrasi Sebagai Respon Penolakan RKUHP dan RUU KPK di media online: analisis framing pada Kompas.com.	Penelitian Kualitatif	2021	Penelitian ini membahas tentang demonstrasi penolakan RKUHP dan RUU KPK di lakukan di media online.	Penelitian ini berfokus kepada pemberitaan terhadap demonstrasi penolakan RKUHP dan RUU KPK. Penelitian ini juga lebih menganalisis <i>framing</i> yang dilakukan oleh media online terhadap para mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada 2019

						<p>lalu kemudian Wadah penelitian yang dipilih adalah Kompas.com, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori gerakan sosial dan <i>framing</i> sebagai teori utama penelitian ini.</p>
3.	Heni Putri Yolanda dan Umar Halim	Partisipasi Politik Online Generasi Z Pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019.	Penelitian Kuantitatif	2020	<p>Penelitian ini membahas tentang sejauh mana partisipasi politik secara online dikalangan gen z, penelitian ini membahas tentang gen z lebih berpartisipasi secara informatif dan instrumental disbanding strategis, metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah kuantitatif dan penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik sebagai teori utama.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada partisipasi politik dalam hal pemilihan presiden pada tahun 2019 lalu.</p>
4.	Deva Okta Amelia	Urgensi Tagar (#) Reformasi Dikorupsi dalam Gerakan Mahasiswa Menolak Revisi Kitab Undang-	Penelitian <i>mix method</i>	2020	<p>Penelitian ini membahas tentang gerakan mahasiswa reformasi dikorupsi pada</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus kepada massifnya tagar reformasi dikorupsi, penelitian ini juga lebih general membahas tentang</p>

		undang Hukum Pidana (UU KUHP) di Kota Mataram (Studi Kasus Universitas di Kota Mataram).			2019, penelitian ini juga membahas tentang Aksi digital yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa saat melakukan aksi gerakan reformasi dikorupsi tahun 2019.	sosial media, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>mix methoei</i> dan menggunakan teori propaganda sebagai teori utama dalam penelitian ini.
5.	Muhammad Aswan Zanynu	Memori Reformasi dalam Film Dokumenter “Mosi Tidak Percaya.	Penelitian Kualitatif.	2020	Penelitian ini membahas tentang aksi reformasi dikorupsi yang dilakukan oleh para mahasiswa pada 2019.	Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin berfokus kepada pembuatan film dokumenter untuk gerakan reformasi dikorupsi yang terjadi di seluruh kota-kota besar di Indonesia, penelitian ini juga menekankan adanya relasi memori antara gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 dengan gerakan reformasi dikorupsi yang terjadi pada 2019 silam.
6.	Laili Mulia Anugraheni, Ainun Ni'Matu Rohmah, Nurliah	Analisis Isi Obejektivitas Berita Aksi Mahasiswa Tolak Revisi UU. KPK dan RKUHP Pada Sketsaunmul.co.	Penelitian Kuantitatif.	2021	Penelitian ini membahas tentang aksi mahasiswa tolak revisi UU KPK dan RKUHP dalam media online dan metode penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif.	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus kepada berita aksi mahasiswa nya bukan kepada gerakan sosial, penelitian ini juga berfokus kepada sketsaunmul.co bukan pada sosial media twitter, teori yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan teori pers tanggung jawab

						sosial sebagai teori utama dalam penelitian ini.
7.	Rizki Novita Sari	Independensi Media Online Dalam Memberitakan Demonstrasi Mahasiswa Solo Tolak Revisi UU KPK.	Penelitian Kualitatif.	2021	Penelitian ini membahas tentang penolakan revisi UU KPK secara online.	Penelitian ini berfokus kepada independensi media online dalam memberitakan demonstrasi mahasiswa Solo terhadap penolakan RUU KPK dan RKUHP, penelitian ini juga memfokuskan kepada keberpihakan media online, <i>platform</i> online yang digunakan oleh penelitian ini merupakan media online bukan media sosial dan daerah yang menjadi lingkup penelitian merupakan kota Solo.
8.	Agung Dwi Laksono	Pengaruhh Budaya Politik terhadap partisipasi politik paguyuban Resik Kubur Jero Tengah Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.	Penelitian Kuantitatif.	2021	Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh budaya Politik dengan menggunakan teori yang sama dan metode penelitian yang sama.	Penelitian ini berfokus kepada pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik suatu kelompok.
9.	Ine Kharisma Setia Widhy dan Seta Basri	Aktivisme Politik Generasi Z: Studi kasus partisipasi politik kalangan pelajar di kota Bekasi.	Penelitian Kualitatif.	2020	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas tentang partisipasi politik gen z, pembahasan	Penelitian ini tidak menjadikan gerakan reformasi dikorupsi sebagai pintu awal partisipasi politik gen z di Indonesia maka dari itu penelitian ini tidak membahas tentang gerakan reformasi

					penelitian ini juga berfokus kepada perkembangan politik kalangan pelajar pada masa periode Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. teori utama yang digunakan oleh penelitian ini adalah Teori partisipasi politik.	dikorupsi melainkan membahas tentang perkembangan politik sehingga fokus nya adalah keaktifan politik warga negara Indonesia saat periode Jokowi dan Ma'ruf Amin, kemudian penelitian ini mengambil kota Bekasi sebagai ruang penelitian.
10.	Adi Sucipto	Budaya politik lokal dan partisipasi politik masyarakat di desa Sumbersari Kecamatan Sebulu dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014.	Penelitian Kuantatif.	2015	Persamaan dari penelitian ini menggunakan teori yang sama dan dengan metode penelitian yang sama.	Penelitian ini berfokus kepada partisipasi politik dalam pemilu serta <i>locus</i> penelitian berbeda.

Sumber: Data diolah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai gerakan sosial digital reformasi dikorupsi yang merupakan gerakan terbesar kedua setelah reformasi membuat anak-anak muda yang merupakan bagian dari generasi Zelenial melirik kondisi politik di Indonesia. Hal tersebut karena adanya ke masifan terhadap aksi digital yang dilakukan di sosial media twitter.

Bentuk baru dari gerakan sosial dari turun secara langsung ke titik aksi menjadi gerakan sosial digital mulai menarik minat dari para generasi zelenial untuk ikut serta dalam gerakan tersebut. Hal tersebut membuat peneliti menarik pertanyaan penelitian mengenai pengaruh dari gerakan sosial tersebut terhadap

Budaya Politik gen Z. dengan demikian pokok masalah penelitian ini dapat dirumuskan:

Bagaimana gerakan digital reformasi dikorupsi meningkatkan Budaya politik Gen Z Jakarta timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dirasakan oleh para Gen Z setelah adanya gerakan reformasi dikorupsi yang dilakukan oleh M masyarakat di tahun 2019 dan perubahan indeks budaya politik pada generasi muda yaitu gen Z.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi seputar judul pembahasan yang dibahas oleh penulis, serta meningkatkan citra positif untuk program studi Ilmu Politik dan FISIP UPN Veteran Jakarta.

1.4.2 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dan menjadi tinjauan pustaka untuk penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal yang meliputi:

Bab I

Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang yang disertai dengan penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan teori dan konsep yang melandasi dan mendukung penelitian. Didalam bab ini akan membahas mengenai konseptualisasi dari Gerakan sosial digital reformasi dikorupsi dan budaya politik generasi z.

Bab III

Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel waktu rencana penelitian.

Bab IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan berupa analisis terhadap data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab V

Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.